

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

BAPPEDA adalah singkatan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA R.I , yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota).

Menurut aturan KEPRES No. 27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli adalah :

Berdasarkan **Undang-Undang No. 25 Tahun 2004**, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tugas dan Wewenang dalam perencanaan pembangunan Kota Padang

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat
2. Tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Fisik Dan Prasarana
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Wilayah

Persoalan-persoalan yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Padang

1. Sumber daya manusia yang kurang memadai
2. Kurang nya Koordinasi dengan SKPD lainnya
3. Sarana dan Prasana yang kurang kondisif

5.2 Saran

Pada bagian akhir ini, Penulis ingin menyampaikan saran yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya, Bappeda Kota Padang tetap Mengacu pada aturan-aturan Yang sudah ada.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Bappeda Kota Padang lebih dan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan Masyarakat yang ada di wilayah Kota Padang.

3. Seharus nya Kepala Bidang yang ada di Bappeda Kota Padang adalah orang yang ahli pada Bidang tersebut.
4. Diharapkan ada nya pelatihan-pelatihan yang di berikan kepada pegawai Bappeda Kota Padang khusus nya di Bidang IT.
5. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah mencari solusi untuk gedung dan sarana Bappeda Kota Padang agar dapat di benahi untuk demi kelangsungan pekerjaan dan pelaksanaan tugas Bappeda Kota Padang dengan baik.

